

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu diantara negara di dunia yang hingga saat ini masih menjadi negara berkembang. Meskipun menjadi negara berkembang, namun Indonesia memiliki banyak keragaman sumber daya alam, suku, dan budaya. Kondisi perekonomian di Indonesia bergantung pada pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Pemerintah daerah berhak untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kewenangan daerah secara luas untuk mengatur sumber – sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kemampuan/potensi daerah atau sering disebut otonomi daerah.

Sejak diterapkan sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan yang

penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu komponennya berasal dari pendapatan asli daerah. Dengan adanya desentralisasi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sehingga daerah tersebut mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal tersebut tentunya tidak terlepas adanya pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal.

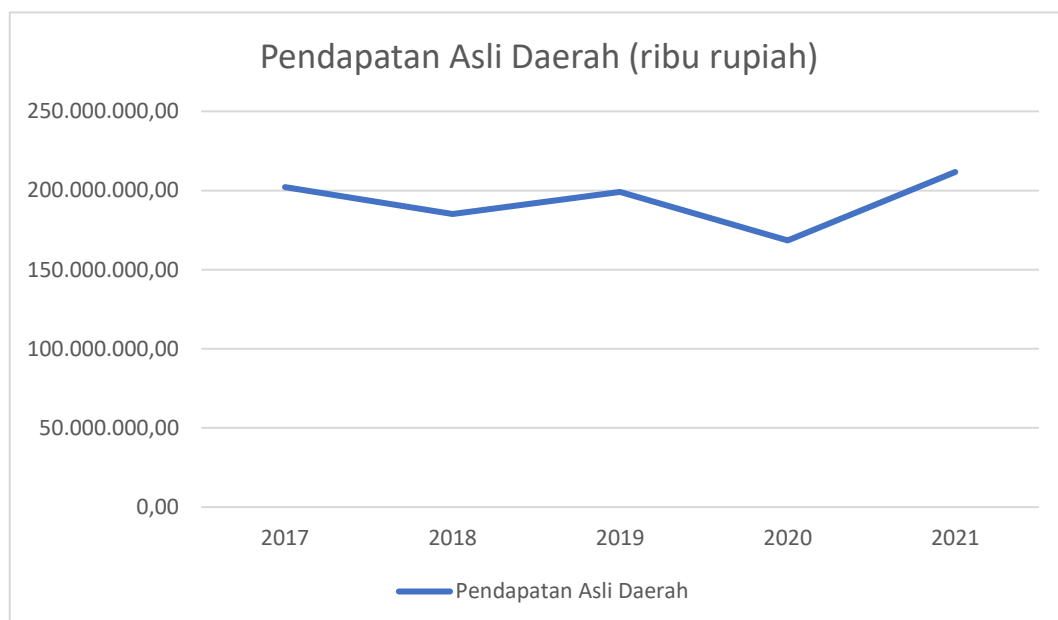
Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah-nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, yaitu dengan peningkatan penerimaan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan daerah yang memiliki pesisir yang cukup luas dan potensial

untuk dijadikan wisata. Kabupaten Pacitan memiliki banyak objek wisata yang potensial yang perlu dikembangkan untuk menjadikan objek pariwisata dalam tingkat regional maupun nasional. Dengan objek wisata yang dimiliki tentunya diharapkan penduduk dapat mengembangkan dan memberikan kontribusi melalui pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Pacitan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif di setiap tahunnya.

Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Peneliti

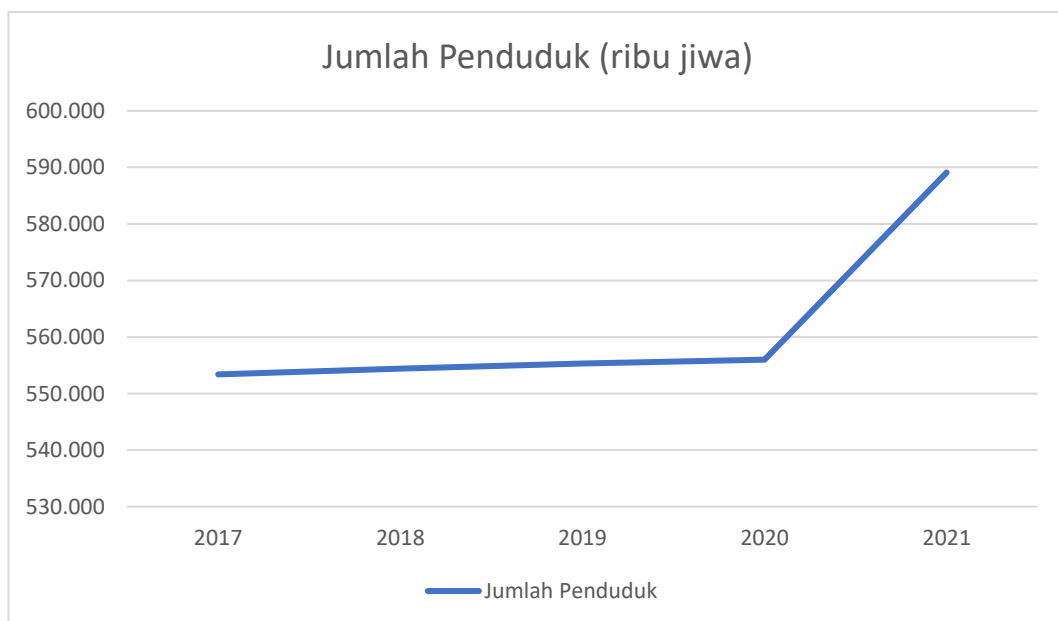
Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 202.090.671,77, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 185.153.427,76. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 199.044.387,52. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 168.459.638,38. Hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 211.689.109,37. Dengan

fluktuatifnya PAD pada Kabupaten Pacitan menggambarkan bahwa adanya pengaruh dari tingkat pendapatan pajak dan retribusi pajak yang diperoleh karena peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalam meningkatkan produksi rumah tangga (Edira & Hermanto, 2020). Jumlah penduduk disini juga berperan dalam pendapatan asli daerah dikarenakan sumber pendapatan yang didapatkan akan meningkat jika penduduk yang ada di suatu daerah sangat banyak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pacitan jumlah penduduk mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.

Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Penduduk



Sumber: Peneliti

Pada tahun 2017-2021 jumlah penduduk mengalami fluktuasi, mulai dari tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 553.388 jiwa hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 555.980 jiwa. Lalu pada tahun 2021 jumlah

penduduk menjadi sebesar 589.108 jiwa. Peningkatan dalam jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap suatu daerah. Dengan diharapkan banyaknya penduduk tersebut, orang bekerja bisa meningkat dan tentunya penerimaan pendapatan seseorang naik dan berdampak terhadap pola konsumsi dalam membeli barang dan jasa, dengan begitu akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan penerimaan pajak yang tinggi di setiap tahunnya dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk ialah aset yang dimiliki oleh setiap daerah dengan segala kualitas serta keahlian yang dimilikinya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

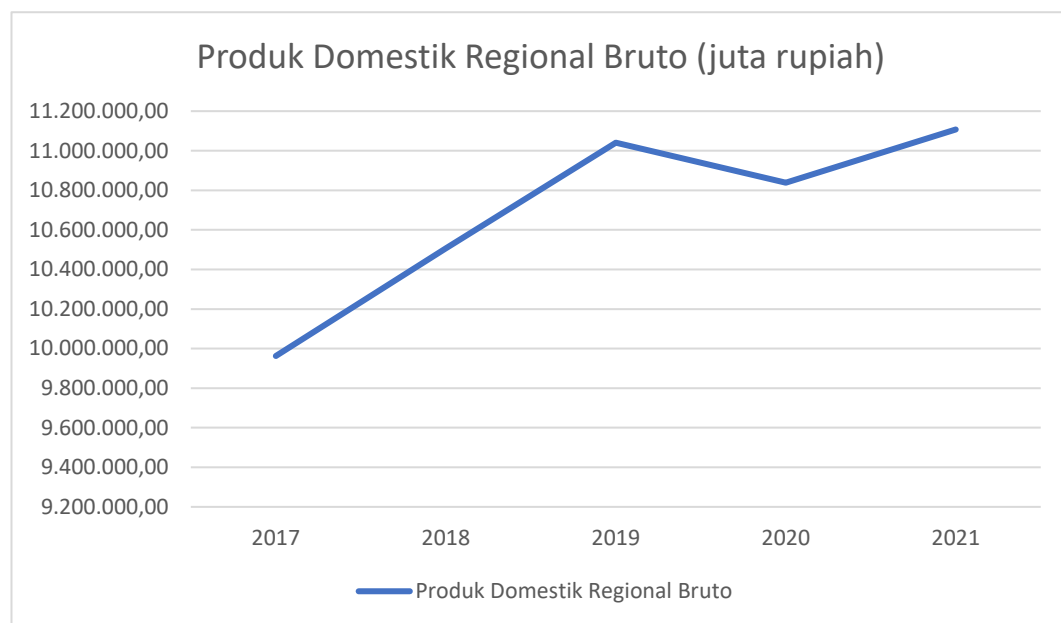
Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui kemampuan daerah dalam menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagai proses kenaikan pendapatan daerah. Dalam mengetahui suatu daerah dikatakan perekonomiannya stabil dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh aktivitas perekonomian di daerah tersebut. PDRB disini memiliki peran yang penting dalam mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam kurun periode waktu tertentu.

Dalam konsep ekonomi makro mengatakan bahwa semakin meningkatnya PDRB dalam suatu daerah mengidentifikasikan akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan program-program yang telah dirancang oleh pemerintah ataupun pembangunan sarana prasarana.

Sehingga hal tersebut akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan nantinya dapat menaikkan produktivitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pacitan Produk Domestik Regional Bruto mengalami fluktuatif di selama 5 tahun terakhir.

Gambar 1. 3 Grafik Produk Domestik Bruto



Sumber: Peneliti

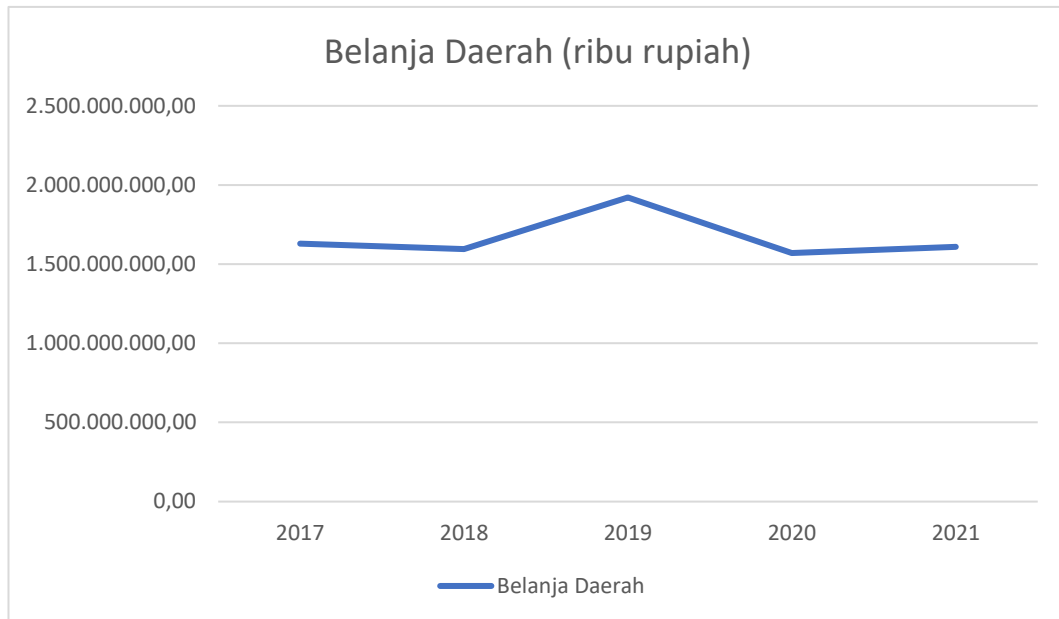
Pada tahun 2017-2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.962.504,73 menjadi Rp. 11.040.774,75. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.837.865,70 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas perekonomian menurun. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 11.107.402,07.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola

dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Liando et al., 2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Fenomena yang terdapat pada struktur APBD kabupaten/ kota di Indonesia yaitu pada sisi pendapatan daerah dimana terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peranan pemerintah pusat melalui transfer. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Penyediaan dana belanja daerah khususnya dalam bidang pelayanan dasar cenderung akan meningkatkan pembangunan, hal ini dikarenakan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja daerah khususnya dalam hal bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan suatu investasi sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan juga belanja daerah mampu berdampak langsung ataupun tidak langsung pada pengurangan kemiskinan di daerahnya lewat pembangunan ekonomi yang merata dan hasilnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin.

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Pacitan Belanja Daerah mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir.

Gambar 1. 4 Grafik Belanja Daerah

Sumber: Peneliti

Dapat dilihat bahwa belanja daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.629.539.754,03, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.595.939.987,64. Kemudian pada tahun 2019 kenaikan hingga mencapai sebesar Rp. 1.921.214.125,57 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dengan sebesar Rp. 1.570.270.990,46. Kemudian, pada tahun 2021 belanja daerah Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 1.610.291.222,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar belanja daerah maka kegiatan perekonomian daerah juga meningkat dikarenakan adanya pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan penunjang daerah, sehingga mampu sebagai faktor pendorong finansial pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan sering kali mengandalkan kebijakan fiskal yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Belanja daerah serta

pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan kontribusi perekonomian daerah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah-nya adalah :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan
2. Untuk menganalisa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan.
3. Untuk menganalisa pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan.

1.4 Ruang Lingkup

Sebagai upaya untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari penelitian ini maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis berfokus pada Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan.

1.5 Manfaat Penelitian

Begitupun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan pada bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, dan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Secara Praktisi :

- a. Bagi Pemerintah, harapannya mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah serta alokasinya terhadap kebutuhan belanja daerah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sumber acuan untuk memperkuat pernyataan dalam penelitian dengan variabel yang berlainan namun pada tema pembahasan yang sama.